



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRAT
DPRD NGADA
TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NGADA TAHUN
ANGGARAN 2024**

Yth. Pimpinan dan bapak-bapak Anggota DPRD Ngada

Yth. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ngada

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ngada

Yth. Bapak Penjabat SEKDA Ngada

Yth. Bapak/Ibu Staf Ahli Bupati Ngada

Yth. Bapak/Ibu Asisten SETDA Ngada

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Perangkat Daerah Ngada

Yth. Bapak/Ibu Camat Sekabupaten Ngada

Yth. Bapak Kepala Desa dan Lurah Sekabupaten Ngada

Yth. Saudara/saudari Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Ahli Pimpinan DPRD Ngada

Yth. Rekan-Rekan Media (Cetak dan Elektronik)

Singkatnya Bapak/Ibu, Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Shalom

Salve

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Swastiasu

Namo Budhaya

Salam Kebajikan

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua

Pada tempat yang pertama, Fraksi mengajak kita sekalian untuk menundukan kepala sejenak menghaturkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Penyertaan dan Penyelenggaraannya sehingga pada hari ini kita boleh hadir kembali dalam ruang paripurna terhormat ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Fraksi juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada sudah yang menyiapkan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada tahun 2024 secara baik dan telah disampaikan ke lembaga DPRD Ngada tepat pada waktunya. Fraksi juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menyampaikan pandangan umum atas **Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024. Fraksi juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Ngada** atas kerja sama yang baik bersama **DPRD Ngada** sehingga sudah memasuki tahun ke-6 pengelolaan APBD Ngada selalu mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Opini WTP merupakan sebuah pencapaian penting bagi pemerintah kabupaten Ngada, karena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun telah sesuai standar Akuntansi Pemerintah dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hemat Fraksi, Kendatipun pemerintah kabupaten Ngada meraih opini WTP untuk pengelolaan APBD Ngada Tahun 2024, tetapi pemerintah tetap membenah dan melakukan tindaklanjuti seperti, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dengan cara menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi berbasis online; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan cara memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan benar; mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan cara memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan melakukan rekonsiliasi secara berkala untuk memastikan akurasi data; dan Menindaklanjuti semua temuan audit dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang kami Hormati

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sarana introspeksi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Pasal 31 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Bupati menyampaikan rancangan pertauran daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah **diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan**, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal yang sama juga ditegaskan dalam paragraph 7 pasal 320 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 194 Pertauran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah. Selanjutnya di dalam operasionalnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedomaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua regulasi ini akan menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan APBD bagi seluruh komponen terkait. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara substansial memuat 7 (Tujuh) laporan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan equitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan wajib dan telah diaudit oleh BPK RI.

Kendatipun audit BPK RI Perwakilan Provinsi NTT terhadap APBD Ngada 2024 mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, tetapi sebagai wakil rakyat yang melekat fungsi pengawasan, fraksi tetap ingin mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah kabupaten Ngada terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ngadatan tahun anggaran 2024.

A. Pendapatan Daerah

1. Fraksi meminta penjelasan pemerintah terhadap PAD dari target Rp 50.519.508.005,00 realisasi Rp 47.701.023.657,24 atau hanya mencapai 90,46%. Khusus pada pos Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari **Retribusi Daerah** ditetapkan sebesar RP 10.422.268.005,00, terealisasi hanya sebesar RP 4.848.846.432,58 atau 46,52%. Fraksi mohon penjelasan pemerintah, mengapa capaiannya sangat rendah.

B. Belanja Daerah

1. Fraksi ingin mendapatkan jawaban dan penjelasan dari **DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG** yaitu pada nomor 229 ada alokasi anggaran sebesar RP 105.306.000,00 untuk teleford **kampung Raja-Kecamatan Boawae**

Kabupaten Nagekeo, dan nomor urut 231 ada alokasi anggaran sebesar RP 166.499.000,00 di **kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo**.

2. Fraksi ingin meminta penjelasan pemerintah pada **Dinas Kesehatan** nomor 607, dari Total anggaran yang ditetapkan untuk Penambahan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Maronggela sebesar RP 2.087.900.000,00 realisasi sebesar RP 1.983.505.000,00 masih ada sisa sebesar RP 104.395.000,00. Mohon penjelasan, terhadap sisa anggaran yang sangat besar ini.
3. **Dinas Kelautan dan Perikanan, Nomor urut 469 dalam Perda** yaitu Pembangunan dan Pengembangan Jetty sebesar RP 1.900.555.000,00 Realisasi sebesar RP 1.805.527.250,00. Terhadap hal ini Fraksi mohon penjelasan pemerintah melalui dinas teknis, lokasinya dimana dan mengapa sisa anggaran cukup besar.
4. **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan** Nomor urut 466 Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Kantor BPP Jerebu 2013 sebesar RP 40.000.000. Apakah ini dikerjakan sejak tahun 2013 atau dana RP 40.000.000 ini sudah dikerjakan sejak tahun 2013. Demikian juga dengan nomor urut 467, pekerjaan pembangunan lantai jemur kentang kec. Bajawa di kantor BPP Bajawa 2014 sebesar RP 30.000.000,00.
5. Fraksi meminta penjelasan Pemerintah terhadap PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGADA yaitu Pos Beban sebesar RP 10.187.833.124,00. Fraksi mohon perincian operasional kegiatan dan belanja pegawai; Direktur, Kabag, dan staf.

Forum Paripurna yang kami Banggakan

Sebelum mengakhiri penyampaian pandangan umum ini, ada beberapa hal yang ingin kami fraksi kemukakan agar menjadi perhatian pemerintah:

1. Fraksi menegaskan kepada pemerintah agar seluruh program dan kegiatan yang sudah termuat dalam PERDA APBD 2024 dan belum dilaksanakan agar menjadi perhatian dari masing-masing pimpinan perangkat daerah untuk tahun anggaran berikutnya;
2. Saat ini Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ngada sedang melakukan seleksi dan rekrutmen Direktur, kepala Bagian dan Dewan Pengawas PERUMDA Kabupaten Ngada. Fraksi berharap agar proses seleksi harus profesional dan obyektif;
3. Fraksi meminta perhatian pemerintah agar setelah ditetapkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 menjadi PERDA, Pemerintah segera menyaipkan Dokumen KUA/PPAS untuk Ranperda Perubahan APBD 2025.

Akhirnya dengan memohon Berkat dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi PAN DPRD Ngada menyatakan **MENERIMA RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ngada Tahun Anggaran 2024** untuk dibahas dalam masa sidang ini sesuai dengan mekanisme kedewanan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Memberkati kita semua.

Bajawa, 11 Juli 2025

FRAKSI AMANAT-DEMOKRAT DPRD NGADA

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tandatangan
1	Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd	Ketua	
2	Benediktus Lagho, S.Pd	Sekretaris	
3	Florianus Rero, S.E	Anggota	